

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS
VALUE FOR MONEY DI KOTA MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

RAKA MAHYUDIN HAKIKI
2018310192

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2022**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Raka Mahyudin Hakiki
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 September 1999
NIM : 2018310192
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* di Kota Mojokerto

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal:

(Laely Aghe Africa, SE., MM)

NIDN : 0709078301

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal:

(Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., CTA)

NIDN : 0716067802

***THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND
SUPERVISION ON VALUE FOR MONEY-BASED BUDGET
PERFORMANCE IN MOJOKERTO CITY***

Raka Mahyudin Hakiki

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: 2018310192@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of accountability, transparency, and supervision on value for money-based budget performance in Mojokerto city. The method of determining the sample in this study uses purposive sampling. The research sample are 51 respondents in regional organization of Mojokerto city. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The result shows that transparency and supervision has a significant effect on the performance of budget based on the value for money while accountability has no significant impact on the performance of budget based on the value for money.

Keywords : *Accountability, transparency, supervision, budget performance, value for money.*

PENDAHULUAN

Kota Mojokerto merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang tergolong sedang berkembang. Sama seperti daerah-daerah yang lain, Kota Mojokerto ini tentunya membutuhkan dana cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, yang besumber dari pemerintah daerah kota Mojokerto sendiri. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang pemerintah daerahnya selalu giat melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat ataupun Provinsi.

Fenomena yang dapat diperhatikan pada pengelolaan anggaran sekarang ini adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh organisasi-organisasi/badan pusat ataupun daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk menyajikan, memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan menggali segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab pada masyarakat yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mendapat pertanggungjawaban ini. Sedangkan sebuah transparansi dilakukan atas dasar informasi yang bebas, dimana seluruh proses

pemerintahan dan informasi mengenai pemerintahan perlu diakses, dan informasi yang ada harus *valid* agar dapat dimengerti dan dipantau.

Terkait dengan data anggaran di Kota Mojokerto bersumber dari kominfo.jatimprov.go.id, Walikota Mojokerto, mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap kebijakan umum anggaran pemerintah Daerah, adanya perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah maupun perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Dikatakannya, garis besar masing-masing pos dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori keagenan dicetuskan pertama kali oleh Jensen & Meckling. Menurut Jensen & Meckling (1976) *Agency Theory* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Dalam hal ini, manajemen perusahaan yang bertindak sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan benar sebagai

pertanggungjawaban kepada investor yang bertindak sebagai *principals*.

Teori keagenan berhubungan dengan konservatisme akuntansi karena perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi memiliki laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena laporan keuangan yang disusun dengan cara yang konservatis cenderung minimum kesalahan karena telah menganut prinsip yang berhati-hati dalam mengakui beban dan keuntungan, sehingga mengurangi konflik antar pihak. Teori ini juga mampu memperkuat pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi karena adanya kepentingan antar pihak *principals dan agent*.

Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan *outcome* secara bersama-sama. Indikator kinerja pada *value for money* berpusat pada ekonomi (Arifani et al., 2018).

Ekonomis, efisien, dan efektif adalah tiga elemen utama pelaksanaan pengelolaan anggaran pada sektor publik. Dalam hal ini indikator/paramater *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi), serta kualitas kinerja pelayanan (efektivitas). Tiga pokok bahasan dalam *value for money* ini

saling berhubungan satu sama yang lain.

Akuntabilitas

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Akuntabilitas publik adalah kewajiban *steward* untuk bertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Shara et al., 2020) .

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan penyingkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bias menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, 2) akuntabilitas horizontal (*horizontal*

accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Putri & Subardjo, 2017).

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Pelaksanaan suatu transparansi diukur menggunakan beberapa indikator yaitu: kemudahan akses informasi, penyediaan informasi yang jelas serta mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur yang ada, biaya dan tanggungjawab, menyusun mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar (Rigian & Sari, 2019).

Transparansi berarti tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerahnya. Dengan ketersediaan informasi yang ada, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional (Arifani et al., 2018).

Pengawasan

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan

tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang memiliki tujuan agar suatu perencanaan sekaligus pelaksanaannya berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Pengawasan adalah salah satu tindakan yang dilakukan guna mengefektifkan kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan memiliki tujuan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dipastikan agar berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan atau aturan pemerintah. Variabel pengawasan diukur berdasarkan indikator yaitu, perencanaan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, pertanggung jawaban dan tujuan (Rigian & Sari, 2019).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban bagi pemegang kepercayaan, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyakikan dan mengungkapkan informasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan dalam hal ini sebagai *principal* yang mempunyai hak dan kewenangan dalam pertanggungjawaban tersebut. Apabila tingkat akuntabilitas meningkat maka disini kualitas

kinerja pengelolaan anggaran semakin bagus. Implementasi prinsip *good corporate governance* yang diaplikasikan pada instansi pemerintah pusat ataupun daerah sebagai aspek dasar penilaian dari masyarakat apakah kinerja yang dilakukan instansi pemerintah sesuai dengan prinsip *value for money* atau tidak. Hasil dari pengelolaan anggaran yang baik butuh pertanggungjawaban yang ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas pada pengelolaan anggaran berbasis *value for money* yang dapat dikatakan baik apabila saling berkaitan satu sama lain.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kewenangan/hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya sampai hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi dalam anggaran dapat digunakan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan anggaran seperti korupsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai setiap kejadian yang ada sehingga menjadi alat pengendalian terhadap

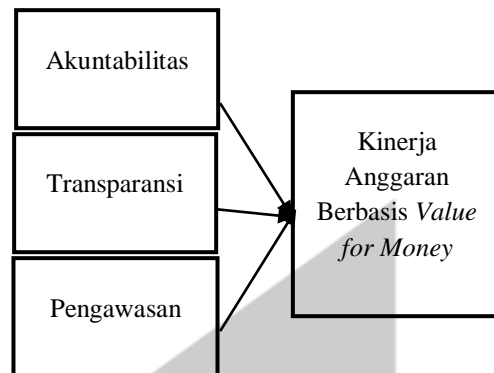
pemerintahan suatu daerah. Adanya pemerintahan daerah maupun pusat yang efektif, akuntabel, bersih, serta peduli terhadap masyarakat merupakan perwujudan transparansi yang memiliki akuntabilitas horizontal. Dalam hal ini kepentingan masyarakat menjadi hal pokok yang harus diutamakan

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money di Kota Mojokerto

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money

Apabila proses penyusunan anggaran jika tidak dikontrol dengan baik maka nantinya berpotensi muncul permasalahan serta biaya-biaya terbuang atau bisa disebut boros serta tidak terserap secara penuh sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan lebih baik jika mampu menjalankan tugas intinya sesuai dengan fungsi untuk mengurangi atau mencegah penyimpangan yang akan terjadi. Sistem pengawasan pemerintah yang baik diharap bisa mengontrol tugas yang dilakukan dengan tepat agar bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintah sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan maupun penyelewengan dana. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan.

H3 : Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money di Kota Mojokerto



GAMBAR 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *hypothesis testing* yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. *Hypothesis testing* menjelaskan terkait pengaruh dan hubungan antar variabel. Jika ditinjau dari jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena data dalam penelitian ini termasuk data dalam bentuk angka atau numerik.

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang beracuan pada fenomena digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian (Sugiyono, 2015, p. 14). Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer, data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di instansi pemerintah Kota

Mojokerto dengan membagikan kuisioner yang nantinya akan diisi oleh responden dengan kriteria yang telah ditentukan.

Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen adalah kinerja anggaran berbasis *value for money*. Berikutnya adalah variabel independen diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan ukuran perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja anggaran berbasis *value for money*

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran berbasis *value for money*. Sistem kinerja anggaran berkonsep *value for money* atau anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Value for money adalah konsep pengelolaan yang dipakai pada sektor publik yang memiliki tiga elemen kunci yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas. Variabel ini menjelaskan anggaran sebagai alat untuk melakukan perencanaan kegiatan publik yang digunakan sebagai alat pengendalian, agar fungsi perencanaan dan pengendalian berjalan dengan baik, maka pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis, serta

menggunakan konsep *value for money*.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam penelitian ini akuntabilitas yang dimaksud adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh OPD Kota Mojokerto sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Implementasi transparansi diukur melalui indikator yaitu: kemudahan dalam mengakses informasi, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur, biaya dan tanggungjawab, menyusun mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar atau permintaan pihak tertentu untuk membayar uang suap, dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh

pemerintah dalam mengefektifkan kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengawasi, mengevaluasi serta mengontrol kegiatan pemerintah sehingga berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti berupa pegawai/staff Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto.

Sampel penelitian merupakan bagian dari total dan karakteristik dari populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai/staff Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto.

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil sampel adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah pengambilan sampel dengan acuan kriteria-kriteria yang telah dipertimbangkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian agar sampel yang didapat representatif (Sugiyono, 2015, p. 124). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini ditujukan untuk kepala, bendahara, sekretaris atau bagian keuangan disetiap instansi OPD Kota Mojokerto.

2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan anggaran keuangan dengan asumsi bahwa dalam periode tersebut telah memiliki bekal pengalaman dalam penganggaran.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pemrosesan/pengolahan data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji kualitas instrumen dan data, analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji-t dengan menggunakan software SPSS. :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif terdiri dari jumlah sampel, range, nilai minimum, nilai maksimum, sum, mean, deviasi standar, variance. Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, bagaimana profil dan distribusi variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan kinerja anggaran berkonsep value for money. Analisis statistik deskriptif dilakukan

untuk menunjukkan gambaran tentang hasil penelitian yang ada di lapangan, yaitu berupa jawaban dari responden terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner untuk masing-masing variabel. Variabel yang dianalisis pada penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar dapat mengetahui letak rata-rata penilaian responden di setiap pertanyaan pada masing-masing variabel

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5 - 1}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Tabel 1
Interval Kelas Penilaian Pernyataan

Interval	Kategori
$1.00 \leq X \leq 1.80$	Sangat Tidak Setuju
$1.80 \leq X \leq 2.60$	Tidak Setuju
$2.60 \leq X \leq 3.40$	Netral
$3.40 \leq X \leq 4.20$	Setuju
$4.20 \leq X \leq 5.00$	Sangat Setuju

Statistik Deskriptif Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang

mengacu pada persepsi akuntabilitas dalam sektor pemerintahan. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Akuntabilitas

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
X1.1	3	3	4	14	27	4.16	1.173
X1.2	3	3	4	11	20	4.22	1.189
X1.3	5	4	4	28	10	3.67	1.178
X1.4	3	6	2	22	18	3.90	1.188
X1.5	3	1	2	26	19	4.12	1.013
X1.6	4	1	3	13	30	4.25	1.181

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
X1.7	6	2	3	35	5	3.61	1.115
X1.8	6	2	3	32	8	3.67	1.160
X1.9	0	4	4	24	19	4.14	0.872
Rata-Rata keseluruhan						3.97	1.118

Sumber: Hasil olah data SPSS 24, 2022

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan mengenai akuntabilitas memiliki nilai rata (*mean*) 3.97 yang berarti bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menjawab semua pertanyaan tentang akuntabilitas publik dengan jawaban 'setuju' ($3.40 \leq X \leq 4.20$) dan memiliki nilai rata-rata standar deviasi sebesar 1.118 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Sehingga menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi dengan baik yang artinya tidak ada perbedaan nilai yang besar antara pernyataan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa responden pada penelitian ini setuju dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang dilakukan untuk

mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu instansi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas juga dijelaskan bahwa akuntabilitas sangat berperan dalam membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Statistik Deskriptif Transparansi

Transparansi adalah salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang mengacu pada persepsi transparansi dalam sektor pemerintahan. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Transparansi

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
X2.1	2	1	3	31	14	4.06	0.881
X2.2	2	1	5	30	13	4.00	0.894
X2.3	2	3	6	34	6	3.76	0.885
X2.4	15	17	8	6	5	2.39	1.297
X2.5	2	1	2	35	11	4.02	0.836
X2.6	2	1	3	28	17	4.12	0.909
X2.7	2	2	3	31	13	4.00	0.917
X2.8	1	2	4	38	6	3.90	0.728

X2.9	2	2	3	20	24	4.22	1.006
Rata-Rata keseluruhan						3.83	0.928

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan mengenai transparansi memiliki nilai rata-rata (mean) 3.83 yang berarti bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menjawab semua pertanyaan tentang transparansi dengan jawaban 'setuju' ($3.40 \leq X \leq 4.20$) dan memiliki nilai rata-rata standar deviasi sebesar 0.928 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Data tersebut berdistribusi dengan baik yang artinya tidak ada perbedaan nilai yang besar antara pernyataan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya. Responden pada penelitian ini telah paham dengan aspek transparansi dan mayoritas telah mengetahui cara kerjanya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas sebagian besar responden pada penelitian ini mendukung adanya suatu ketrasparanan dan responden memahami aspek ini. Namun adapula responden yang kurang paham mengenai proses atau prosedur trasparansi ini

Analisis Deskriptif Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang mengacu pada persepsi pengawasan dalam sektor pemerintahan. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pengawasan

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
X3.1	4	5	10	26	6	3.49	1.084
X3.2	1	2	9	31	8	3.84	0.809
X3.3	2	2	3	17	27	4.27	1.021
X3.4	3	1	1	17	29	4.33	1.052
X3.5	2	2	2	26	19	4.14	0.960
X3.6	2	2	4	27	16	4.04	0.958
X3.7	3	5	4	30	9	3.73	1.060
X3.8	1	9	11	24	6	3.49	0.987
X3.9	1	5	2	21	22	4.14	1.020
Rata-Rata keseluruhan						3.94	0.994

Sumber: Hasil olah data SPSS 24, 2022

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan mengenai pengawasan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.94 yang berarti responden pada penelitian ini menjawab kesembilan item pertanyaan dengan jawaban ‘setuju’ ($3.40 \leq X \leq 4.20$) dan nilai rata-rata standar deviasi sebesar 0.994 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Sehingga dapat diketahui bahwa data berdistribusi dengan baik atau tidak ada perbedaan nilai yang besar antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Nilai rata-rata (*mean*) tertinggi terdapat pada X3.4 sebesar 4.33 yang artinya pengawasan anggaran dilakukan oleh inspektorat daerah memang dilakukan secara rutin. Adapun nilai rata-rata (*mean*) terendah terdapat pada X3.1 dan X3.8 sebesar 3.49, walaupun

terendah, nilai ini tergolong setuju. Jadi, para responden berperan memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran serta mengerti bila DPRD secara aktif melakukan pengawasan anggaran dengan menugaskan BPK

Analisis Deskriptif Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Kinerja anggaran berbasis value for money adalah variabel dependen pada penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan 11 item pertanyaan yang mengacu pada persepsi Kinerja anggaran berbasis value for money yang berlaku pada sektor pemerintahan Kota Mojokerto. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kinerja Anggaran

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
Y.1	1	6	2	22	20	4.06	1.047
Y.2	2	3	0	15	31	4.37	1.038
Y.3	1	1	3	43	3	3.90	.608
Y.4	1	2	1	14	33	4.49	.880
Y.5	2	1	1	36	11	4.04	0.824
Y.6	2	1	1	14	33	4.47	0.946
Y.7	1	2	2	34	12	4.06	0.785
Y.8	2	3	7	27	12	3.86	0.980
Y.9	2	1	1	24	22	4.24	0.929
Y.10	3	1	2	16	29	4.31	1.068

Variabel X1	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi
Y.11	2	1	2	12	34	4.47	0.966
Rata-Rata keseluruhan						4.20	0.915

Sumber: Hasil olah data SPSS 24, 2022

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan mengenai kinerja anggaran berbasis *value for money* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.20 yang berarti responden pada penelitian ini menjawab ketujuh item pertanyaan dengan jawaban 'sangat setuju' ($4.20 \leq X \leq 5.00$) dan menunjukkan nilai rata-rata standar deviasi sebesar 0.915 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Sehingga dapat diketahui bahwa data berdistribusi dengan baik atau tidak ada perbedaan nilai yang besar antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya pada kuesioner. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sangat setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner. Namun dalam tabel 5 terdapat jawaban responden yang tidak konsisten. Beberapa responden tersebut tidak setuju dengan pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dari hasil analisis diatas juga menerangkan bahwasannya

value for money atau anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang berdistribusi normal atau mendekati data normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Residual normal jika nilai (*sig*) > 0,05. Berikut hasil pengujian normalitas pada penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		51
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.43109478
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.122
	<i>Positive</i>	.122
	<i>Negative</i>	-.101

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Statistic</i>	.122
Asymp. Sig. (2-tailed)	.057 ^c

Sumber: Hasil olah data SPSS 24, 2022

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,057 \geq 0,05$, H_0 diterima hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan dalam penelitian ini guna

menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam menguji multikolonieritas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value. Jika nilai tolerance value $> 0,10$ dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi adanya multikolinieritas dan sebaliknya. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi adanya multikolinieritas dan sebaliknya.

Tabel 7
Hasil Uji Multikoneritas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Statistic</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
	Akuntabilitas	0.259	3.855
	Transparansi	0.412	2.429
	Pengawasan	0.244	4.104

Sumber: Hasil olah data SPSS 24, 2021

Berdasarkan tabel 7 hasil uji multikolonieritas, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi multikolonieritas,

karena nilai Tolerance Value $> 0,10$ dan nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 disetiap variabel.

Uji Hipotesis dan Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstdarized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.400	1.456		6.457	0.000
	Akuntabilitas	-0.003	0.067	-0.010	-0.051	0.960
	Transparansi	0.162	0.062	0.417	2.614	0.012
	Pengawasan	-0.347	0.075	-0.960	-4.633	0.000

Hasil uji regresi linier berganda diatas, dapat menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,400 - 0,003X_1 + 0,162X_2 - 0,347X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi dan tabel 8 diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 9,400 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (transparansi, akuntabilitas, pengawasan) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto) adalah sebesar 9,400.
2. Koefisien variabel akuntabilitas (X1) sebesar -0,003 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin akuntabilitas, maka kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto akan mengalami penurunan sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen kinerja anggaran berbasis *value for money* dengan variabel independen akuntabilitas memiliki hubungan negatif linier, jika kinerja anggaran berbasis *value for money* meningkat, maka akuntabilitas akan mengalami
3. Koefisien variabel transparansi (X2) sebesar 0,162 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin transparansi, maka kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto akan naik sebesar 0,162. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja anggaran berbasis *value for money* dan transparansi memiliki hubungan linier, maka semakin tinggi transparansi, akan semakin tinggi kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto.
4. Koefisien variabel pengawasan (X3) sebesar -0,347 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pengawasan, maka kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto akan mengalami penurunan sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen kinerja anggaran berbasis *value for money* dengan variabel independen pengawasan memiliki hubungan negatif linier, jika kinerja anggaran

berbasis *value for money* meningkat, maka pengawasan akan mengalami penurunan dan sebaliknya, jika pengawasan mengalami peningkatan maka kinerja anggaran berbasis *value for money* akan mengalami penurunan sebesar 0,347satuan.

5. “e” menunjukkan variabel yang ada di luar variabel penelitian, yang terbatas akuntabilitas transparansi, dan pengawasan.

Uji t

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t menunjukkan bahwa, masing-masing nilai signifikansi pada variabel independen, Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,960 > 0,05$, maka H_0 diterima atau koefisien regresi tidak signifikan. Artinya akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh signifikan kinerja anggaran berbasis *value for*

money di Kota Mojokerto (Y)

2. Variabel transparansi (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto (Y).
3. Variabel pengawasan (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa pengawasan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto (Y).

Uji F

Uji F dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen)..

Tabel 9
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2179.536	3	726.512	58.010	0.000 ^b
	Residual	588.621	47	12.524		
	Total	2768.157	50			

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 58,010 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti model regresi

fit (baik) dan variabel independen dapat menjadi penjelas terhadap variabel dependen. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dapat menjelaskan

pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto.

KESIMPULAN

- a. Hipotesis satu tidak terbukti, hal ini dibuktikan pada uji hipotesis menghasilkan, bahwa maka H_0 diterima atau koefisien regresi tidak signifikan. Artinya akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh signifikan kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto (Y). Berdasarkan teori stewardship penelitian ini juga tidak sejalan dengan prinsip teori tersebut, karena para steward belum menjalankan tugas/tujuan mereka untuk bertanggung jawab pada *principal*.
- b. Hipotesis kedua terbukti, hal ini dibuktikan pada uji hipotesis menghasilkan bahwa maka H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto (Y). Berdasarkan teori stewardship penelitian ini sejalan dengan prinsip teori tersebut, karena para steward telah menjalankan tugas/tujuan mereka untuk bertanggung jawab dengan melakukan tindakan ketransparanan pada *principal*.
- c. Hipotesis ketiga terbukti, hal ini dibuktikan pada uji hipotesis menghasilkan bahwa H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Artinya bahwa pengawasan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value*

for money di Kota Mojokerto (Y). Berdasarkan teori stewardship penelitian ini sejalan dengan prinsip teori tersebut, karena para steward telah menjalankan tugas/tujuan mereka untuk bertanggung jawab dengan melakukan tindakan pengawasan pada saat penyusunan anggaran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memonitor dan membimbing responden untuk pengisian kuesioner agar tujuan yang akan diteliti dapat ditemukan dengan mudah (melakukan penelitian topik ini setelah pandemi).
2. Pada penelitian selanjutnya, variabel independen yang menyinggung *good corporate governance* bisa diperbanyak lagi. Agar menciptakan nilai pengungkapan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, J., Saleh, H., & Chahyono, C. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur. *Indonesian Journal of*

- Business and Management*, 2(2), 105–111.
<https://doi.org/10.35965/jbm.v2i2.405>
- Aisyah. (2021). *Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah*. 145–152.
- Halim, A. (2019). *Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Malang*. 7(1), 1–10.
- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, 6(3), 467–480.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–81.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25* (9th ed.). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 68.
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Laporan Keuangan. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 164–169.
- Jatmiko, B., Akuntansi, P. S., & Yogyakarta, M. (2020). *PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN*. 0832(September), 231–246.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kautsar, M., Andirfa, M., & Rahman, B. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 3(2), 69–81.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner*, 3(1), 91.
<https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Ni Luh Putu Uttari Premananda. (2017). Pengaruh Akuntabilitas,

- Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2451–2476.
- Pertiwi, D. P. (2016). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep Value for money pada instansi pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Priyatno, D. (2016). Belajar alat analisis data dan cara pengolahannya dengan SPSS. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467–480.
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset AKuntansi*, 6(12), 1–19.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.11>
- Setiyaningrum, I. (2017). *Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik the Influence of Accountability , Transparency , and Control Towards Budgeting Performance of Value for Money Concept At. 000(4)*, 1–20.
- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17.
- Sudewi, K. N., Herawati, N. trisna, & Yuniarta, G. A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Sugiyono, P. D. (2016). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). In *ALFABETA* (2015th ed.).
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>